

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA DI KABUPATEN MALANG**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh:**

**FIRMANSAH HANDIKA RAMADHAN**

**115020100111033**



**JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2018**

**LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL**

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA DI KABUPATEN MALANG**

Yang disusun oleh :

Nama : Firmansah Handika Ramadhan  
NIM : 115020100111033  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Desember 2017

Malang, 20 Desember 2017

Dosen Pembimbing,



**Prof. Dr. Drs. M Umar Burhan, MS.**

NIP. 194608101974121002

# **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN MALANG Firmansah**

**Handika Ramadhan**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Email:

handika1703@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Malang yang dapat digunakan sebagai bahan masukan, informasi dan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Malang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *regresi linier berganda*. Data yang digunakan adalah data sekunder *time series* berupa Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Malang mulai tahun 2000 - 2015.

Dari hasil analisis penelitian ini maka dapat kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Malang.

Kata Kunci: IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah

---

## **A. Pendahuluan**

Pembangunan merupakan suatu langkah dalam membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada atau membuat suatu perubahan yaitu membuat sesuatu menjadi lebih baik atau meningkat. Pembangunan nasional yang berlandaskan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini nampaknya sederhana. Tetapi seringkali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. (UNDP: *Human Development Report*, 2000)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan (United Nation Development Programme, UNDP). Arti penting manusia dalam pembangunan adalah manusia dipandang sebagai subyek pembangunan yang artinya pembangunan dilakukan memang bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat.

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah: pertama, banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. Kedua, banyak negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti:

penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.

Indeks ini pertama kali dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. UNDP dalam model pembangunannya, menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam semua proses dan kegiatan pembangunan.

Menurut UNDP (1995), paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu : (1) Produktifitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia, (2) Ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini, (3) Kestinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi, (4) Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktifitas manusia akan meningkat sehingga mereka menjadi agen pertumbuhan yang efektif.

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi (teori Cobb-Douglas). Dalam teori Cobb-Douglas mengemukakan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kualitas *human capital*-nya. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini misalnya dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya.

Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasilnya. Pemerataan kesempatan harus tersedia, baik semua orang, perempuan maupun laki-laki harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan.

Pemerintah dalam hal ini memiliki berbagai peran dalam perekonomian. Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah, menurut Guritno (2001) yaitu: (1) Peran Stabilisasi, Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain. (2) Peran Distribusi, Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu negara dapat terdistribusi secara baik dalam masyarakat. (3) Peran Alokasi, Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar yang harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.

Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah dalam rangka menjalankan ke-tiga peran yang ada, maka tentunya diperlukan pula dana yang besar sebagai bentuk pengeluaran segala kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan ketiga peran tersebut. Pengeluaran pemerintah ini merupakan konsekuensi dari berbagai kebijakan yang diambil dan diterapkan melalui ke-tiga peran tersebut.

Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, di antara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan. Investasi pada sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan. Kesehatan serta pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan

berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif.

Investasi pada modal manusia diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang salah satunya dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan. Investasi modal manusia ini yang mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dalam mendorong peningkatan kualitas SDM. Menurut Mankiw (2008), pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia.

Tentu dalam kaitan itu juga penting adanya distribusi pendapatan. Dengan distribusi pendapatan yang baik membuka kemungkinan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini karena dengan meratanya distribusi pendapatan maka tingkat kesehatan dan juga pendidikan akan lebih baik dan pada gilirannya juga akan memperbaiki tingkat produktifitas tenaga kerja. Studi Alesina dan Rodrik (Meier dan Rauch, 2000) menemukan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak buruk juga pada pembangunan manusia suatu daerah.

Selain itu rumah tangga masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti: makanan, kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya. Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin (Charisma Kuriata Ginting, 2008).

Kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Menurut UNDP, Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

### **Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM**

Menurut Midgley (1995), menjelaskan bahwa pembangunan sosial merupakan penedekatan pembangunan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan sosial tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah

bermakna kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja.

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi (Brata, 2004).

Istilah modal manusia (human capital) pertama kali dikemukakan oleh Gary S. Becker. Ace Suryadi (1994) (Dalam Boediono 1999). yang mengkaji lebih dalam mengenai peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa, semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori Human Capital, yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki penghasilan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang. Sejak tahun 1999, United Nations Development Program (UNDP) mengenalkan konsep pengukuran mutu modal manusia yang diberinama Human Development Index atau disebut IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Adanya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dapat memungkinkan meningkatnya output dan pendapatan dimasa yang akan datang sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

### **Hubungan antara Tingkat Kemiskinan dengan IPM**

Menurut UNDP (1995) hubungan antara tingkat kemiskinan dan pembangunan manusia, yaitu banyaknya penduduk miskin turut mempengaruhi pembangunan manusia. Karena penduduk yang masuk kelompok ini, pada umumnya memiliki keterbatasan pada faktor produksi, sehingga akses terhadap kegiatan ekonomi mengalami hambatan. Akibatnya produktivitas menjadi rendah, pada gilirannya pendapatan yang diterima pun jauh dari cukup. Dampaknya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan mengalami kesulitan. Apalagi untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya menjadi terhambat. Implikasinya pada wilayah-wilayah yang terdapat cukup banyak penduduk miskin, akan mengalami kesulitan untuk mencapai keberhasilan pada pembangunan manusianya.

Apriliyah S. Napitupulu (2007), mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Indeks Pembangunan Manusia memiliki indikator komposit dalam penghitungannya antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi per kapita. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan per kapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah.

Todaro (2000) juga mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap



teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Ranis (2004), jika penduduk miskin memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau dengan kata lain terjadi pengurangan tingkat kemiskinan, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan bagian pengeluaran rumah tangga yang dibelanjakan untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga pengurangan kemiskinan dapat kita lihat dari jumlah penduduk miskin tersebut, atau dengan kata lain dengan berkurangnya penduduk miskin maka pembangunan manusia akan mengalami peningkatan.

Menurut Yani Mulyaningsih (2008) indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (Longevity) dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

Lanjouw, dkk. (2001) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

### **Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan dan Kesehatan) dengan IPM**

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (Dumairy, 1997).

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas,

namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak.

Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antarsektor yang makin kompleks. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya pencemaran atau polusi. Pemerintah harus turun tangan mengatur dan mengurangi dampak negatif dari polusi. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Basri, 2005).

Musgrave (1980) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam presentase terhadap PDB semakin besar dan presentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya (Dumairy, 1997).

Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan. (Mangkoesobroto, 1994).

Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental (Lanjouw, dkk 2001).

Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Seperti diungkapkan oleh Meier dan Rauch (2000), pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 ada disebutkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengalokasikan 20 persen anggaran untuk bidang pendidikan di luar gaji dan biaya kedisiplinan. Jadi, anggaran pendidikan yang dimaksud di sini adalah termasuk kategori anggaran pembangunan karena tidak termasuk di dalamnya anggaran rutin yang berupa gaji dan lain-lain.

Sedangkan untuk masalah kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Setiawan, 2006, Dalam Irna 2015).

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana

publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

### C. Metode Penelitian

Dengan menganalisis data yang diperoleh untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan model ekonometrika dengan meregresikan variabel-variabel yang ada dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Data-data yang digunakan, dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik yaitu persamaan regresi linear berganda. Variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4) \dots\dots\dots 1$$

Kemudian fungsi tersebut ditransformasikan kedalam model persamaan linear berganda (*multiple regression*) dengan spesifikasi model sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \dots\dots\dots 2 \text{ Dimana}$$

- :
- Y = Indeks pembangunan manusia (persen)
  - $\alpha$  = Intercept
  - X<sub>1</sub> = Pertumbuhan ekonomi (persen)
  - X<sub>2</sub> = Persentase penduduk miskin (persen)
  - X<sub>3</sub> = Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (milyar) X<sub>4</sub> = Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (milyar)
  - $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien regresi  $\varepsilon$  = Terms of error

### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan dengan data yang telah diolah dengan alat SPSS yakni hasil olahan data regresi, maka persamaan regresi dapat dijabarkan sebagai berikut :  $y = 67,144 + 0,448X_1 - 0,464X_2 + 0,122X_3 + 0,256X_4$

Persamaan regresi tersebut di atas dapat diterjemahkan secara statistik sebagai berikut:  
 $\beta_0 = 67,144$  yang diartikan tanpa kenaikan pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan maka indeks pembangunan manusia sebesar 67,144%  
 $\beta_1 = 0,448$  yang artinya dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan diikuti oleh peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 0,448% dengan asumsi X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, dan X<sub>4</sub> constant.

$\beta_2 = -0,464$  yang artinya dengan adanya peningkatan persentase penduduk sebesar 1% miskin maka akan diikuti oleh penurunan indeks pembangunan manusia sebesar 0,464% dengan asumsi X<sub>1</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>4</sub> constant.

$\beta_3 = 0,122$  yang artinya dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan sebesar 1% dapat diikuti oleh peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 0,122% dengan asumsi X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> X<sub>4</sub> constant.

$\beta_4 = 0,256$  yang artinya dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan sebesar 1% dapat diikuti oleh peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 0,256% dengan asumsi X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> X<sub>3</sub> constant.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia. Dari hasil output SPSS diperoleh nilai pvalue sebesar 0,006, karena nilai pvalue kurang dari 0,05 berarti dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan demikian hipotesis 1 terbukti, hal ini sesuai dengan teori dari hasil penelitian Midgley (1995) yang menjelaskan bahwa pembangunan sosial tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah bermakna kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas.

Pengaruh tingkat kemiskinan dengan indeks pembangunan manusia. Berdasarkan hasil uji regresi antara persentase penduduk miskin dengan indeks pembangunan manusia maka diperoleh nilai pvalue sebesar 0,022. Karena nilai pvalue =  $0,022 < 0,05$  berarti dapat disimpulkan ada pengaruh signifikan antara tingkat kemiskinan dengan indeks pembangunan manusia. Dengan demikian hipotesis kedua terbukti, hal ini sejalan dengan teori dimana menurut UNDP (1996) bahwa banyaknya penduduk miskin turut mempengaruhi pembangunan manusia dan dari teori hasil penelitian Ranis (2004), jika penduduk miskin memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau dengan kata lain terjadi pengurangan tingkat kemiskinan maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan bagian pengeluaran rumah tangga yang dibelanjakan untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan yang lebih tinggi.

Pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dengan indeks pembangunan manusia. Dari hasil analisis regresi antara pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dengan indeks pembangunan manusia maka diperoleh nilai pvalue =  $0,038$ , sehingga dapat dikatakan ada pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dengan indeks pembangunan manusia, alasannya karena memiliki nilai pvalue  $0,038 < 0,05$ . Dengan demikian hipotesis tiga terbukti. Hal ini sesuai dengan teori hasil penelitian Meier dan Rauch (2000) bahwa pendidikan atau lebih luas lagi adalah modal manusia dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat.

Pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dengan indeks pembangunan manusia. Dari hasil analisis regresi antara pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dengan indeks pembangunan manusia maka diperoleh nilai pvalue =  $0,002$ , sehingga dapatlah dikatakan ada pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dengan indeks pembangunan manusia, alasannya karena memiliki nilai pvalue  $0,002 < 0,05$ . Dengan demikian hipotesis empat terbukti. Hal ini sejalan dengan teori dari hasil penelitian Setiawan (2006) kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya.

## **E. Kesimpulan Dan Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Malang, dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji regresi ternyata memiliki nilai  $\text{sig} = 0,006 < 0,05$ , karena nilai  $\text{sig}$  kurang dari 0,05 berarti ada pengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian hipotesis terbukti.
2. Pengaruh jumlah persentase penduduk miskin, terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Malang berpengaruh signifikan. Dari hasil uji regresi diketahui bahwa nilai  $\text{sig} 0,022 < 0,05$  berarti ada pengaruh negatif dan signifikan dengan IPM.
3. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial untuk pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki nilai  $\text{sig} = 0,038 < 0,05$ , sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM yang memiliki nilai  $\text{sig} 0,02 < 0,05$ , karena nilai  $\text{sig} < 0,05$  berarti signifikan. Dengan demikian hipotesis terbukti.

### **Saran-saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:
  - Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro.
  - Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
2. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :
  - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan maupun perkotaan.
  - Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah.
  - Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus.
3. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :
  - Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)
  - Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA)
  - Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi
  - Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di puskesmas maupun rumah sakit
4. Memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dengan sistem layanan kesehatan gratis, memperbanyak PUSKESMAS dan unit layanan kesehatan

kepada masyarakat desa. Serta memberikan jaminan asuransi dan jaminan sosial terhadap masyarakat desa. Jaminan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan memberikan semangat hidup yang lebih berarti.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Ed. 3, Yogyakarta. Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Bappenas. 2004. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan)*. Jakarta. Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- , 2006, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- BPS-Statistic Indonesia, UNDP, BAPPENAS, 2004. National Human Development Report 2004. The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
- Corel Asion, 2009, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Asing dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.
- Dalimunthe, Masniary. 2004. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Dumairy, 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Emil Salim, 1996. *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ginting, Karisma Kuriata. 2008. *Analisis Pembangunan Manusia*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Gujarati, Damodar. 2012. *Dasar dasar ekonometrika*. Jakarta: Salemba.
- Hendra Esmara, 1986, *Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional Di Indonesia*. [www.googlebooks.co.id](http://www.googlebooks.co.id). Diakses Februari 2017.
- Hasil hasil pembangunan Kabupaten Malang 2015*. Malang: Bappeda Kabupaten Malang.
- Hutabarat, 1994, *Kebijakan Pembangunan dan Kemiskinan*. [www.reformed-crs.org](http://www.reformed-crs.org). Diakses April 2017.
- Ilham Irawan, 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Tahun 2012, Edisi Tahun 2013. Kabupaten Malang.
- Lanjouw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow, 2001. *Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?*. World Bank Working Paper No. 2739. Washington D.C.: World Bank.
- M, Alex Febrianto. 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia*. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*, Edisi–III. Yogyakarta: BPFE Mankiw, Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Meier & Rauch. 2000. *Pioneer Of Development Economic*. [www.googlebooks.co.id](http://www.googlebooks.co.id). diakses April 2017.
- Mulyaningsih, Yani. 2008. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Publik Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia dan Pengurangan Kemiskinan*. Yogyakarta: YKPN
- Musgrave. 1980. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Erlangga

- Midgley. 1995. *Social Development*. [www.books.google.com](http://www.books.google.com). Diakses April 2017
- Nasikun. 2001. *Kemiskinan (Konsep & Penyebab)*. [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id). Diakses April 2017.
- Napitupulu. 2007. *Pengaruh Komposit Index IPM Terhadap Penurunan Kemiskinan*. [www.repository.ugm.ac.id](http://www.repository.ugm.ac.id). Diakses April 2017
- Nopirin. 2000. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro II*. Yogyakarta: BPFE UGM Raniv,
- Gustav. 2004. *Human Development And Economic Growth*. Yale University.
- Samuelson, Paul & D. Nordhaus, William. 1992. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Sinha, Nistha. 2007. *Gender Equality, Poverty, And Economic Growth*. World Bank.
- Sitepu, Rasidin. dan Bonar, Sinaga. 2004. *Dampak Investasi SDM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia*. [www.repository.ugm.ac.id](http://www.repository.ugm.ac.id). Diakses April 2017.
- Suharto. 2001. *Distribusi Pendapatan Dalam Pembangunan*. Jakarta: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.6. No.1, 2001.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suparmoko. 1994. *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan; Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: PT. Salemba Emman Patria.
- Trifani, Irna. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan dan Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur*. Jawa Timur: Universitas Jember
- Todaro, Michael, P. dan Stephen C. Smith, 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- UNDP. 2000. *Human Development Report*. [www.undp.com](http://www.undp.com). Diakses April 2017.
- UNDP. 1995,. *Human Development Report*. [www.hdrundp.org](http://www.hdrundp.org). Diakses April 2017.